SABTU,
14 Maret 2026

PSG DAPAT LIBUR PANJANG | HLM 8

www.harianmerdeka.co
Rp 15.000,- Terbit Sore

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

KY PERIKSA DUGAAN PELANGGARAN ETIK KETUA DAN WAKIL KETUA PN DEPOK

JAKARTA | Harian Merdeka

Komisi Yudisial (KY) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan pemeriksaan tersebut bertujuan mendalami dugaan pelanggaran etik yang dilakukan kedua hakim tersebut.

"Beberapa hal yang tadi kami tanyakan adalah tentunya menyangkut dengan etik yang dilanggar atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok ini," ujar Desmihardi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Bersambung ke
Halaman 7

Pimpinan MPR dorong percepatan pengesahan RUU MHA jadi undang-undang

JAKARTA | Harian Merdeka

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menjadi undang-undang.

Bersambung ke
Halaman 7

Polri Pastikan Selidiki Dugaan Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Kontras

JAKARTA | Harian Merdeka

Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penganiayaan berat berupa penyiraman air keras terhadap AY yang diketahui sebagai Wakil Koordinator Kontras.

Bersambung ke
Halaman 7

Konflik Timur Tengah,Indonesia Tunda KTT D-8 Sampai Waktu yang Belum Ditentukan

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memutuskan menunda penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8), forum kerja sama ekonomi negara-negara berkembang, yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15 April 2026.

Penundaan tersebut dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, menyatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan situasi keamanan yang tidak stabil di kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat resmi pemberitahuan kepada seluruh negara anggota D-8. "Akhirnya pada tadi malam Bapak Menteri Luar Negeri menandatangani surat dari Pak Menlu kepada mitra-mitranya yang berisikan penundaan pelaksanaan KTT D-8 dan juga seluruh rangkaian kegiatannya," kata Tri melalui keterangan resmi, dalam Taklimat Media di kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Penundaan itu mencakup seluruh agenda KTT D-8 yang sebelumnya telah dijadwalkan, termasuk Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri pada 14 April serta pertemuan tingkat komisioner pada 12–13 Maret 2026.

Tri menegaskan, seluruh negara anggota telah menerima pemberitahuan tersebut dan memahami keputusan yang diambil Indonesia sebagai tuan rumah.

"Penetapan tanggal baru akan dibahas lebih lanjut pada waktu yang tepat. Untuk saat ini, situasi di Timur Tengah masih berkembang," ujarnya.

(Agus)

Redaksi HARIAN MERDEKA

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS
Pemimpin Umum : Helmy Halim, **Pemimpin Perusahaan** : Alan Oskar, **Wakil Pemimpin Perusahaan** : Verencia Mercy, **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab** : Purnomo C, **Wakil Pemimpin Redaksi :** Abdul Rohman, **Redaktur Eksekutif** : Egi Hendrawan, **Redaktur Pelaksana** : Agus Irawan, **Redaktur** : Andri Achdiat, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, **Reporter** : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar,Ian Zarian,Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabiro Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, **Sekretaris Redaksi** : Syafina Azzahra, **Keuangan** : Yosefin Arwinda Devi, **Manager Iklan** : Muksin, P.Adi, **Iklan** : S Fajar, Wilki Irawan, **Pemasaran** : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, **Layout** : Boby Saputra, Fuad, **IT Web** : Walid, Amel, **Bagian Umum/OB** : Wawan, **Penasehat Hukum** : Hanafi Tanawijaya. SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Heboh, Pengemudi di Tangerang Tabrak Rampok Hingga Jatuh,Uang Ratusan Juta Nyaris Hilang

JAKARTA |
Harian Merdeka

Heboh sebuah video yang memperlihatkan perampok kabur ke rumah warga setelah jatuh ditabrak mobil korban di Kampung Pabuaran Desa Bugel, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada Kamis (12/3/2026) sore.

Dalam rekaman videonya, tampak Pengemudi itu Nyaris kehilangan uang ratusan juta rupiah tersebut.

"Uang ratusan Juta Nyaris Raib, Pengemudi di Tangerang Tabrak Motor Rampok Hingga Jatuh" tulisnya dalam keterangan video dikutip pada Sabtu (14/3/2026).

Namun, hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait adanya perampok di wilayah hukumnya tersebut. **(Agus)**

Dugaan Korupsi Tambang Ilegal Rp 2,6 Triliun, Sohat Chairil dan Sohut Chairil Miliki Peran di PT JMB Group

JAKARTA |
Harian Merdeka

Kasus dugaan pertambangan batu bara ilegal yang melibatkan PT JMB Group memasuki babak baru yang semakin memanas. Fokus penyidikan kini mengarah tajam pada dugaan keterlibatan Sohat Chairil dan Sohut Chairil sebagai sosok beneficial owner atau penerima manfaat utama dari skandal yang merugikan negara hingga Rp2,6 triliun tersebut.

Aktivitas ilegal ini diketahui mengeksploitasi lahan negara seluas 1.600 hektar. Lahan tersebut merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 01 milik Kementerian Tenaga Kerja dan (dahulu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Gurita Perusahaan di Lahan Negara

Praktik pengerukan sumber daya alam tanpa izin ini diduga dijalankan melalui jaringan tiga korporasi yang saling terafiliasi, yakni:

- PT JMB
- PT ABE
- PT KRA

Meski beroperasi di atas lahan milik pemerintah, aktivitas pertambangan ini dilaporkan berjalan bertahun-tahun tanpa kontribusi resmi yang sesuai bagi kas negara, melainkan justru memperkaya segelintir individu.

Enam Tersangka Telah Ditahan, Aktor Utama Masih Diburu

Sejauh ini, pihak berwenang telah menetapkan dan menahan enam orang tersangka yang dianggap bertanggung jawab secara administratif dan operasional. Keenam tersangka tersebut adalah:

- 3 Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi: Diduga berperan dalam memberikan celah regulasi dan pembiaran.
- 3 Mantan Direktur PT JMB Group: Bertanggung jawab langsung atas teknis operasional di lapangan.

Namun, pengamat hukum mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti di level manajerial. Nama Sohat Chairil dan Sohut Chairil kini menjadi sorotan publik karena diduga kuat sebagai "dalang" yang mengendalikan aliran dana dari hasil tambang tersebut.

Pelacakan Aset: Dari Hotel Mewah hingga Kebun Sawit

Keuntungan fantastis senilai Rp2,6 triliun tersebut diduga tidak mengendap di rekening perusahaan, melainkan telah dialirkan ke berbagai sektor untuk menyamarkan asal-usulnya (pencucian uang). Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim penyidik kini tengah memantau sejumlah aset yang diduga milik kedua sosok tersebut, di antaranya:

1. Sektor Perhotelan: Sejumlah hotel mewah yang berlokasi di pusat bisnis Jakarta.
2. Sektor Perkebunan: Lahan kelapa sawit dalam skala luas yang tersebar di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan Timur.
3. Properti: Berbagai aset tak bergerak di lokasi strategis nasional.

"Penegakan hukum harus menyasar hingga ke akar, termasuk pengejaran aset (asset recovery) dari para penikmat utama hasil kerusakan lingkungan ini," ujar seorang pengamat hukum sumber daya alam.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan lahan transmigrasi agar tidak disalahgunakan oleh korporasi demi keuntungan pribadi. Publik kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk menyeret para beneficial owner ke meja hijau. **(Agus)**

PBHI Jakarta Kutuk Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Alarm Bagi Aktivis dan Pembela HAM

JAKARTA |
Harian Merdeka

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mengutuk aksi penyiraman air keras kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), di kawasan Jalan Salemba I Talang, Jakarta Pusat pada Kamis (12/3/2026) pukul 23.00 WIB. Mendesak polri segera melakukan pemetaan dan menangkap pelaku sekaligus otak dibalik percobaan dan pembunuhan terhadap Wakil Koordinator KontraS

"PBHI Jakarta desak Polri untuk segera gerak cepat identifikasi pelaku dan penyelidikan menyeluruh. Sebab, bukan tidak mungkin motif dan dalang dibalik penyerangan tersebut mengarah kepada pembungkaman total"- ucap Ketua PBHI Jakarta, Muhammad Ridwan Ristomoyo, Sabtu, 14 Maret 2026, di Sekretariat PBHI Jakarta, Jl, Hang Jebat III, Kebayoran Baru

Ridwan menilai, peristwa keji yang dialami oleh aktivis dan pejuang Andrie Yunus adalah gejala serius dari otoritarianisme. Menurutnya yang menimpa Wakil Koordinator KontraS merupakam tindakan represi terukur terhadap aktivis dan pembela HAM dalam upaya memperkecil kritik.

Berdasarkan data 2025 kemarin yang di catat Organisasi Masyarakat Sipil mencatat sebanyak 283 pembela HAM mengalami serangan karena kerja-kerja mereka sepanjang 2025. Antara lain, kriminalisasi, penangkapan, pelaporan ke polisi dan percobaan pembunuhan. Mayoritas dari pembela HAM yang mengalami serangan adalah jurnalis dan masyarakat adat, masing-masing sebanyak 106 dan 74 orang,

"Sekali lagi peristiwa ini adalah alarm bagi aktivis dan pembela HAM. Kita harus mengingat kembali satu tahun Pemerintahan Prabowo kebebasan sipil kian menyusut dan buruk. Ini alarm bagi kehidupan bernegara",-tutup Ridwan. ● **(Agus)**

Orang Tua Anak Korban Gigitan Anjing Minta Polisi Proses Pemilik Hewan

Ilustrasi

NIAS UTARA |
Harian Merdeka

Orang tua seorang anak berusia lima tahun yang menjadi korban gigitan anjing di Desa Bitaya, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, meminta polisi segera memproses hukum pemilik hewan tersebut.

Korban berinisial IZ mengalami luka gigitan pada bagian paha setelah diserang anjing peliharaan tetangganya yang disebut-sebut merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) berinisial FSZ. Peristiwa itu terjadi pada Selasa, 10 Februari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.

Ayah korban, Sadirma Zalukhu, mengatakan anaknya saat itu berada di rumah kerabat yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah mereka.

"Tiba-tiba ada yang berteriak memanggil istri saya dan memberi tahu bahwa anak kami telah digigit anjing," kata Sadirma kepada kepada Harian Merdeka, via sambungan telfon selular Kamis, 12 Maret 2026.

Mendengar kabar tersebut, ibu korban segera berlari menghampiri anaknya yang saat itu menangis kesakitan akibat gigitan anjing. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Afulu untuk mendapatkan perawatan medis.

Menurut hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami luka gigitan hewan atau vulnus morsum pada bagian paha.

Sadirma mengatakan istrinya sempat mendatangi rumah pemilik anjing untuk meminta pertanggungjawaban. Namun respons yang diterima dinilai tidak menunjukkan itikad baik.

"Istri saya datang ke rumahnya, tapi dia malah mengatakan bukan dia yang menyuruh anjing itu menggigit anak kami," ujar Sadirma menirukan ucapan terlapor.

Keluarga korban mengaku telah mencoba menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan melalui mediasi di tingkat desa. Namun upaya itu tidak mencapai kesepakatan.

Karena itu, pada 19 Februari 2026, keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Alasa, Polres Nias. Dia beralasan, akibat peristiwa itu hingga saat ini, anaknya masih lema dan demam.

"Kami sudah menempuh jalur damai, tetapi tidak ada tanggung jawab dari pemilik anjing. Kami berharap laporan ini segera diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Sadirma.

Pelaksana Tugas Kepala Seksi Humas Polres Nias, Aipda Motivasi Gea, membenarkan laporan tersebut sedang ditangani polisi.

Menurut dia, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor dan sejumlah saksi.

"Informasi dari Kapolsek Alasa, kemarin tiga orang sudah dimintai keterangan. Untuk terlapor akan segera dipanggil dalam waktu dekat," kata Motivasi, kepada Harian Merdeka, Jumat (13/03/2026).

● **(Adi)**

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Ingatkan Perusahaan Bayar THR Tepat Waktu

TANGSEL | **Harian Merdeka**

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka Posko Konsultasi dan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 mulai 9 hingga 31 Maret 2026.

Posko tersebut dibuka untuk memastikan hak pekerja atau buruh terpenuhi menjelang Hari Raya, sekaligus memberikan ruang konsultasi apabila terjadi kendala dalam pembayaran THR oleh perusahaan.

Layanan posko berlokasi di Kantor Disnaker Tangsel, Gedung Arsip Lantai 5. Selain datang langsung, pekerja juga dapat menyampaikan pengaduan melalui email resmi disnaker.tangsel@gmail.com atau melalui laman Kementerian Ketenagakerjaan di poskothr.kemnaker.go.id.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan Sabam Maringan mengatakan, pembukaan posko tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengawal pemenuhan hak pekerja.

"Kami membuka posko ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak pekerja. Apabila sampai tujuh hari sebelum Hari Raya THR belum dibayarkan, pekerja dapat segera melapor," ujarnya, dikutip Wartawan, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Apabila terdapat laporan perusahaan tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, Disnaker Tangsel akan meneruskan laporan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selaku pengawas ketenagakerjaan untuk diproses lebih lanjut.

Selain itu, jika laporan disampaikan sebagai perselisihan hak, Disnaker Tangsel dapat melakukan pencatatan serta memfasilitasi proses mediasi antara pekerja dan perusahaan.

Sabam menjelaskan, ketentuan pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya.

"Perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif," katanya.

(Wil/dam)

Safari Ramadan di UNIMAR, Wagub Dimyati Serahkan Bantuan untuk Muhammadiyah

BANTEN | **Harian Merdeka**

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggelar kegiatan Safari Ramadan 1447 H / 2026 M yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah AR Fachruddin (Unimar), Kabupaten Tangerang, Jumat (13/3/2026). Wakil Gubernur (Wagub) Achmad Dimyati Natakusumah, memberikan sejumlah bantuan kepada pihak Muhammadiyah di lokasi tersebut.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan tiga bantuan, yakni bantuan untuk masjid sebesar Rp10 juta untuk rehabilitasi, bantuan pesantren sebesar Rp5 juta untuk renovasi, serta bantuan beasiswa sebesar Rp300 ribu bagi siswa SMP dan SMA Muhammadiyah Tangerang," kata perwakilan SMP Muhammadiyah Boarding School Tangerang, Thoat Hamim.

Bantuan yang diberikan Pemprov Banten menjadi bentuk kepedulian pemerintah bagi Muhammadiyah di Kabupaten Tangerang. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Sementara itu, Wagub Dimyati mengatakan, Safari Ramadan menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Muhammadiyah dan Unimar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia di Banten.

"Mudah-mudahan UNIMAR terus berkembang dan Muhammadiyah terus meningkat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua PW Muhammadiyah Banten KH M Syamsudin mengatakan, pihaknya terus melakukan sinergi, kolaborasi, dan kontribusi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan. Muhammadiyah di Banten memiliki potensi seperti perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga sosial yang dapat mendukung program pembangunan pemerintah.

"Dalam Safari Ramadan ini kami mengundang pimpinan-pimpinan daerah supaya program pemerintah dengan Muhammadiyah dapat saling menguatkan, saling memberi kontribusi positif," pungkasnya. **(hmi)**

Arus Penyeberangan di Merak, BBJ, dan Ciwandan Terpantau Lancar

CILEGON |
Harian Merdeka

Polda Banten sampaikan situasi arus kendaraan di kawasan penyeberangan Pelabuhan Merak, jalur penyangga BBJ, dan Pelabuhan Ciwandan.

Dalam kesempatannya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan sejak tadi malam hingga siang hari ini penyeberangan terpantau berjalan tertib. "Berdasarkan hasil pemantauan sejak tadi malam hingga siang hari ini, pergerakan kendaraan yang menuju pelabuhan maupun yang akan melakukan penyeberangan berjalan tertib. Kendaraan logistik sumbu tiga dengan golongan 7, 8, dan 9 yang dialihkan melalui jalur BBJ juga terpantau berjalan normal tanpa hambatan berarti," ucap Irjen Pol Hengki di Pelabuhan Ciwandan pada Sabtu (14/03).

"Sementara itu, di JLS ada golongan 5 dan 6B itu menunggu antre untuk naik ke kapal, jadi tidak ada kemacetan sampai dengan hari ini semua lancar baik di BBJ, ASDP Merak sangat lengang dan lancar," lanjut Kapolda Banten.

> **Berdasarkan hasil pemantauan sejak tadi malam hingga siang hari ini, pergerakan kendaraan yang menuju pelabuhan maupun yang akan melakukan penyeberangan berjalan tertib. Kendaraan logistik sumbu tiga dengan golongan 7, 8, dan 9 yang dialihkan melalui jalur BBJ juga terpantau berjalan normal tanpa hambatan berarti,"**

Irjen Pol Hengki menambahkan bahwa di kawasan Pelabuhan Ciwandan arus kendaraan roda dua terpantau lancar. "Antrean kendaraan roda dua yang akan naik ke kapal saat ini hanya sekitar satu lajur dengan jumlah kurang lebih 50 hingga 60 unit kendaraan," tambahnya.

Diakhir, Kapolda Banten menyampaikan bahwa secara keseluruhan arus kendaraan di tiga Pelabuhan hingga siang hari masih dalam keadaan kondusif, aman, dan terkendali. "Secara umum, situasi di kawasan Pelabuhan Merak, BBJ, dan Ciwandan terpantau cukup lengang dan arus lalu lintas berjalan lancar. Meski pada malam hari di Merak sempat terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya kendaraan pribadi, kondisi tersebut dapat terurai dengan baik," tutupnya.

(Egi)

KY PERIKSA

Pada kesempatan yang sama, anggota KY Abhan menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami hasil pemeriksaan sebelum menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tugas dan kewenangan KY dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

"Intinya bahwa ruang kewenangan kami adalah pada persoalan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Itu yang kami dalami. Persoalan tindak pidana korupsi adalah wilayah KPK," kata Abhan.

Menurut Abhan, untuk sementara KY memandang kedua pejabat PN Depok tersebut telah melanggar kode etik hakim setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh KY di Gedung Merah Putih KPK menunjukkan adanya sinergi positif antara kedua lembaga dalam penegakan hukum.

"Ini menjadi sinergi yang positif antara KPK dan KY karena dalam proses penegakan hukum, baik dugaan tindak pidana korupsi maupun penegakan etik adalah dua hal yang berjalan beriringan," ujarnya.

Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Sehari kemudian, KPK mengungkapkan telah menangkap tujuh orang dalam operasi tersebut, yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, seorang pegawai PN Depok, serta seorang direktur dan tiga pegawai perusahaan PT Karabha Digdaya yang merupakan anak usaha Kementerian Keuangan.

Dari tujuh orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, juru sita PN Depok Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, serta Head Corporate Legal Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau janji dalam pengurusan sengketa lahan seluas sekitar 6.500 meter persegi di Kecamatan Tapos, Kota Depok. **(rhm/hmi)**

PIMPINAN MPR

"Upaya pembahasan RUU MHA sudah berlangsung 16 tahun, tetapi hingga kini belum juga lahir undang-undang. Momentum Hari Masyarakat Adat Nasional harus menjadi pendorong semua pihak untuk memperkuat komitmen pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat di tanah air," kata dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikannya dalam rangka Hari Masyarakat Adat Nasional yang diperingati setiap 13 Maret. Menurut Lestari, saat ini tidak ada alasan lagi untuk menunda pembahasan RUU MHA untuk segera dijadikan undang-undang.

"Data menunjukkan 11,7 juta hektare wilayah adat hilang, 162 warga adat dikriminalisasi, dan jutaan hektare lainnya dikuasai korporasi. Ini bukan sekadar angka, ini darurat kemanusiaan," ujarnya.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, masyarakat adat adalah benteng terakhir konservasi kawasan hutan dan menjaga ketahanan pangan nasional.

"Mereka menjaga hutan, menyediakan pangan tanpa merusak alam, tetapi kerap dikriminalisasi dan dirampas tanah leluhurnya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan," kata Rerie.

Anggota Komisi X DPR RI itu berharap, masuknya RUU MHA pada Prolegnas 2026 harus diikuti dengan langkah pembahasan yang nyata.

Ia berharap, pembahasan RUU MHA dapat melahirkan payung hukum yang kuat bagi eksistensi masyarakat adat di tanah air.

Data terkini menunjukkan 50-70 juta jiwa masyarakat adat tersebar di Indonesia. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat potensi wilayah adat yang terpetakan mencapai 32,3 juta hektar.

Per Juli 2025, pemerintah Indonesia baru menetapkan sekitar 333.687 hingga hampir 400 ribu hektar hutan adat secara resmi.

Sementara itu 8,16 juta hektare wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi tambang dan perkebunan.

"Negara harus hadir untuk seluruh warganya, termasuk masyarakat adat. Ini amanat konstitusi. Sudah cukup mereka menanti. Tahun ini harus menjadi tahun pengakuan, bukan tahun penantian yang berlarut," tuturnya. **(ant)**

POLRI

Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 12 Maret 2026 sekitar pukul 23.30 WIB di Jakarta Pusat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen. Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa kasus ini mendapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Saat ini, Polri telah melakukan langkah awal berupa penanganan tempat kejadian perkara (TKP) serta serangkaian tindakan penyelidikan. Penanganan perkara tersebut didasarkan pada Laporan Polisi Nomor LPA/222/III/2026/Satreskrim/RestroJakpus/Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) dan/atau Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023n tentang KUHP.

"Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Polri sudah melakukan langkah-langkah penanganan TKP dan saat ini proses penyelidikan terus berjalan," ujar Kadivhumas Polri dalam keterangan resminya, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, Polri akan mengedepankan metode scientific crime investigation dengan memeriksa para saksi serta mengumpulkan alat bukti yang relevan guna mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.

"Polri dalam penegakan hukum akan melakukan langkah-langkah secara scientific crime investigation dengan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut," jelasnya.

Saat ini korban diketahui masih menjalani perawatan medis di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan intensif akibat luka yang dideritanya. Polri juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut dan berharap korban segera pulih, Kadivhumas Polri turut mengimbau masyarakat yang mengetahui atau melihat langsung peristiwa tersebut agar dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna membantu proses pengungkapan kasus.

Selain itu, Polri juga memohon dukungan dan doa dari masyarakat agar proses penanganan perkara dapat berjalan lancar. Hal ini mengingat penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap sejumlah barang bukti yang telah diamankan dari lokasi kejadian.

"Kami memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman serta analisa terhadap barang bukti yang telah diperoleh guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut," ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Polri memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara prosedural dan profesional berbasis scientific crime investigation. Perkembangan penanganan perkara ini juga akan terus disampaikan kepada publik secara berkala. Polri juga berharap korban segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menjalankan aktivitasnya seperti sediakala.

(Agus)

Ramadan Cheating Day, Fanny Ghassani Santai Nikmati Takjil hingga Gorengan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Presenter sekaligus aktris Fanny Ghassani mengaku momen berbuka puasa di bulan Ramadan sering menjadi waktu baginya untuk menikmati berbagai makanan tanpa terlalu membatasi diri.

Seperti diketahui, Fanny selama ini dikenal cukup disiplin menjaga bentuk tubuhnya. Ia rutin berolahraga dan memperhatikan pola makan demi menjaga kebugaran serta penampilannya di layar kaca.

Namun saat Ramadan tiba, Fanny mengatakan dirinya cenderung lebih santai dalam memilih makanan saat berbuka. Ia bahkan menyebut momen tersebut seperti cheating day baginya.

"Sebenarnya cheating day sih aku dari dulu gak pernah strict sama makanan. Aku selalu mencoba menikmati semua makanan yang ada di depan mata aku deh," ujar Fanny Ghassani di daerah Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Menurut Fanny, saat waktu berbuka tiba dirinya tidak ragu menikmati berbagai jenis makanan yang tersedia. Mulai dari makanan manis yang identik dengan takjil, hingga gorengan yang kerap menjadi favorit banyak orang saat berbuka puasa.

Meski begitu, Fanny tetap memiliki batasan tersendiri terkait berat badan yang ia jaga. Ia mengaku mulai lebih ketat mengatur pola makan jika angka di timbangan mulai mencapai batas tertentu.

"Misal, aku tuh khawatir kalau berat badan aku udah di 52 kilo. Gitu. Nah kalau aku udah di 52 kilo baru aku strict tuh makanan," lanjut Fanny. **(dth)**

PSG Dapat Libur Panjang Jelang Hadapi Chelsea di Leg Kedua

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Paris Saint-Germain (PSG) punya keuntungan jelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Chelsea. PSG libur di akhir pekan ini!

Chelsea vs PSG pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions akan main di Stamford Bridge. Tanggal mainnya pada Rabu (18/3) pukul 03.00 WIB dini hari, PSG punya keunggulan agregat 5-2.

Dilansir dari Daily Mail, PSG sedianya akan hadapi Nantes di akhir pekan ini. Pihak Ligue 1 kabulkan permintaan PSG untuk mengundurkan jadwal tersebut, demi fokus ke Liga Champions.

Laga kontra Nantes akan digelar pada 20 April mendatang. Artinya, Les Parisiens punya libur panjang!

PSG total dapatkan libur selama enam hari. Sementara Chelsea, mereka harus main di lanjutan Liga Inggris pada akhir pekan ini kontra Newcastle United pada Minggu (15/3) pukul 00.30 WIB dini hari.

Chelsea punya tugas berat, kejar tiga gol ketertinggalan dari PSG. The Blues pun harus fokus di Liga Inggris, demi bisa finis empat besar. **(dts)**